



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 179 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KERJA KECAMATAN BABAKAN
KABUPATEN CIREBON TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa pembangunan daerah harus dilaksanakan dengan prinsip terarah, terintegrasi, efektif, efisien dan akuntabel untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memajukan kondisi daerah;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 273 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana kerja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rancangan Akhir Rencana Kerja yang telah diverifikasi disampaikan kepada Kepala Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Kecamatan Babakan Kabupaten Cirebon Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
9. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Kinerja dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) junto Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 6);
18. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 1);
19. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 33 Tahun 2022 tentang Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 33);
20. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 31 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 31).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA KECAMATAN BABAKAN KABUPATEN CIREBON TAHUN 2024.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Cirebon.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon.

3. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten.
4. Kecamatan Babakan adalah Kecamatan Babakan Kabupaten Cirebon.
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala Bappelitbangda adalah Kepala Bappelitbangda Kabupaten Cirebon.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Cirebon untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.
8. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
9. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
10. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
11. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
14. Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang.

15. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
16. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
17. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan.
18. Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.
19. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif yang terdiri dari unsur masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk menentukan apakah tujuan sudah tercapai.
20. Kebijakan pembangunan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat/Daerah untuk mencapai tujuan;
21. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
22. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
23. Sub kegiatan merupakan bentuk aktivitas/layanan kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
24. Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud.
25. Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.
26. Dampak (*impact*) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) beberapa program.
27. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi

bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.

28. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Renja Kecamatan Babakan Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sebagai penjabaran dari Renstra Kecamatan Babakan Kabupaten Cirebon sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Renja Kecamatan Babakan mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Kecamatan Babakan dengan RKPD, sebagai implementasi pelaksanaan sasaran strategis jangka menengah daerah dan Renstra Kecamatan Babakan yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Maksud Renja Kecamatan Babakan Tahun 2024 adalah:
 - a. sebagai dokumen perencanaan bagi Kecamatan Babakan untuk kurun waktu Tahun 2024 yang mencakup program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.
 - b. sebagai instrumen evaluasi capaian tolok ukur kinerja *impact* sasaran, *outcome* program dan *output* kegiatan Renja tahun sebelumnya dan capaian Renstra Kecamatan Babakan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Tujuan ditetapkannya Renja Kecamatan Babakan Tahun 2024 adalah :

- a. sebagai acuan dalam mengoperasionalkan RKPD Kabupaten Cirebon Tahun 2024 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi pemerintah daerah.
- b. menjadi pedoman bagi Kecamatan Babakan dalam menyusun RKA Tahun 2024.
- c. menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah untuk kurun waktu Tahun 2024 dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah.

BAB IV SISTEMATIKA RENJA

Pasal 4

- (1) Renja Kecamatan Babakan Tahun 2024 disusun dengan sistematika:

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Renja Kecamatan Babakan Tahun 2024.

Bab II Gambaran Pelayanan Kecamatan

Bab ini berisi tentang Evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Babakan tahun lalu dan Capaian Renstra, Analisis Kinerja Pelayanan, Reviu terhadap rancangan Awal RKPD, Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Bab III Tujuan dan Sasaran Kecamatan Babakan

Bab ini berisi tentang Telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Babakan, program dan Kegiatan.

Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang Rencana Program dan Kegiatan, serta Pendanaan Indikatif Kecamatan Babakan Tahun 2024.

Bab V Penutup

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

- (2) Renja Kecamatan Babakan Tahun 2024 dengan sistematika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V PELAKSANAAN

Pasal 5

- (1) Kecamatan Babakan melaksanakan Renstra Tahun 2019-2024 melalui penyusunan Renja tiap tahunnya.
- (2) Kecamatan Babakan melaksanakan Renja melalui penyusunan RKA dan DPA Kecamatan Babakan Tahun 2024.
- (3) Penyusunan dan pelaksanaan RKA dan DPA Kecamatan Babakan Tahun 2024 berpedoman atau mengacu pada indikator kinerja sasaran, program dan kegiatan pembangunan dan pagu indikatif yang telah ditentukan dalam Renja Kecamatan Babakan Tahun 2024.

BAB VI PENGENDALIAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 6

- (1) Camat Babakan selaku Pengguna Anggaran bertanggung jawab atas pencapaian target sasaran strategis dan *outcome* Program yang tercantum dalam Renja Tahun 2023 dan akan dievaluasi capaian realisasinya secara berkala paling lambat tiap triwulan.
- (2) Pejabat Pengawas atau pejabat fungsional yang setara selaku pejabat pelaksana Teknis Kegiatan bertanggung jawab atas pencapaian target *output* kegiatan dan subkegiatan yang tercantum dalam Renja Tahun 2023 dan indikator kinerja kunci yang bersifat *output* dan akan dievaluasi capaian realisasinya secara berkala tiap bulan atau paling lambat tiap triwulan.
- (3) Evaluasi terhadap capaian realisasi indikator kinerja dampak, *outcome* dan *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan dan diinput melalui aplikasi Simonek dengan dilampiri atau diupload bukti pendukungnya.

Pasal 7

- (1) Camat Babakan selaku Pengguna Anggaran wajib menyampaikan laporan realisasi capaian indikator kinerja yang tercantum dalam Renja Tahun 2024 baik secara triwulan, semester maupun akhir tahun.
- (2) Laporan realisasi capaian indikator kinerja secara rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Bappelitbangda.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber

pada tanggal 28 Desember 2023

BUPATI CIREBON,



IMRON

Diundangkan di Sumber

pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

HILMY RIVAI

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2023 NOMOR

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 179 TAHUN 2023
TANGGAL : 28 DESEMBER 2023
TENTANG : RENCANA KERJA KECAMATAN BABAKAN KABUPATEN CIREBON
TAHUN 2024

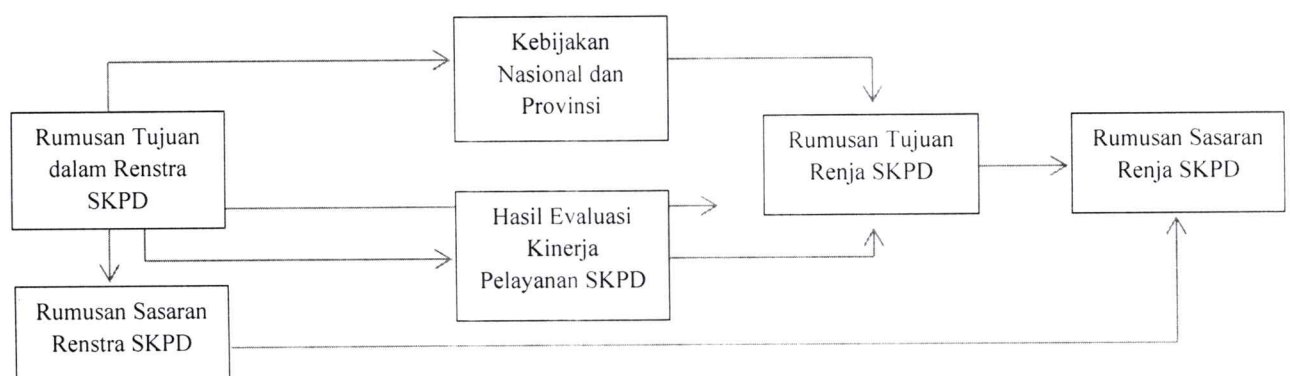
BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); bahwa setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus menyusun Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD). Rencana Kerja Kecamatan Babakan Tahun 2024 adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Kerja memuat program dan kegiatan, lokasi kegiatan, evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, indikator kinerja, kelompok sasaran serta pagu indikatif dan prakiraan maju dana yang dibutuhkan untuk tahun 2024.

Rencana Kerja Kecamatan Babakan Tahun 2024 memiliki fungsi dan peran yang strategis dalam sistem perencanaan pembangunan daerah karena Rencana Kerja pada dasarnya adalah pelaksanaan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024. Rencana Kerja Kecamatan Babakan menerjemahkan RPJMD dan RKPD Kabupaten Cirebon ke dalam rencana program dan kegiatan tahunan, berikut dengan penganggarnya. Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Babakan mengacu pada Rencana Strategis Kecamatan Babakan Tahun 2019-2024 (Renstra SKPD), hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, permasalahan yang dihadapi, dan usulan program dan kegiatan yang berasal dari masyarakat.

PERUMUSAN TUJUAN DAN SASARAN RENCANA KERJA



Rencana Kerja Kecamatan Babakan memuat berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 yang merupakan penjabaran dari Tujuan dan Sasaran dari Renstra Kecamatan Babakan, sebagai satuan kerja perangkat daerah yang merupakan perpanjangan tangan Bupati di wilayah kerja Kecamatan.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan Hukum dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Babakan adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- c. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 244).
- d. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Nomor 4438);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tahapan, Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Pembangunan Jangka Panjang Daerah, serta tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Standar Pelayanan Minimal;
- m. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor Nomor 45);
- n. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 54 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013 (Berita Daerah Tahun 2008 Nomor 54 Seri E);
- o. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 6 seri D.5);
- p. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Cirebon;
- q. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 93 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Fungsi dan Tugas serta Tata Kerja Kecamatan Sekabupaten Cirebon
- r. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 12 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2014-2021;
- s. Keputusan Bupati Cirebon Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Cirebon.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

- a. Maksud penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Babakan Tahun 2024 adalah sebagai dokumen perencanaan Kecamatan Babakan untuk periode 1 (satu) tahun dan menjadi pedoman atau acuan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Selain itu juga, Rencana Kerja Tahun 2024 ini dapat dijadikan bahan kajian evaluasi diri lembaga dalam meningkatkan kinerja Aparatur Pemerintah Kecamatan Babakan.
- b. Tujuan penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Babakan Tahun 2024 adalah :
 - 1. Sebagai acuan dan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2025.
 - 2. Untuk mengarahkan pelaksanaan program dan kegiatan agar mencapai target dan agar sinkron dengan visi dan misi daerah.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Bab I Pendahuluan

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud Dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

Bab II Hasil Evaluasi Renja Kecamatan Babakan Tahun 2022

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Babakan Tahun 2022 dan Capaian Renstra Kecamatan Babakan
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Babakan
- 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Kecamatan Babakan
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bab III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan Dan Sasaran Rencana Kerja Kecamatan Babakan
- 3.3. Program Dan Kegiatan

Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Bab V Penutup

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN BABAKAN TAHUN 2022

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN BABAKAN TAHUN 2022 DAN CAPAIAN RENSTRA KECAMATAN BABAKAN

A. Evaluasi dan Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2022

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan, Kecamatan Babakan Kabupaten Cirebon mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan kabupaten di wilayah kerja Kecamatan. Pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Babakan Tahun 2024 dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun 2024, realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Babakan, sebagaimana dapat dilihat dalam tabel 1 terlampir.

Pada Tahun 2022 dianggarkan melalui APBD sebesar Rp.2.926.112.418,00 (Dua milyar Sembilan ratus dua puluh enam juta seratus dua belas ribu empat ratus delapan belas rupiah) dan realisasi anggaran sampai dengan bulan Desember Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.2.722.452.070,00 (Dua milyar tujuh ratus dua puluh dua juta empat ratus lima puluh dua ribu tujuh puluh rupiah) atau 93,03%. Target dan Capaian Kinerja telah tercapai sesuai dengan program dan kegiatan yang telah dianggarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Babakan Tahun Anggaran 2022 dapat dijelaskan sebagai berikut :

(1) PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Alokasi anggaran untuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp.2.485.242.328,00 (Dua milyar empat ratus delapan puluh lima juta dua ratus empat puluh dua ribu tiga ratus dua puluh delapan rupiah) dan terealisasi sebesar Rp.2.454.419.070,00 (Dua milyar empat ratus lima puluh empat juta empat ratus Sembilan belas ribu tujuh puluh rupiah) sisa sebesar Rp.30.823.258,00 (Tiga puluh juta delapan ratus dua puluh tiga ribu dua ratus lima puluh delapan rupiah)

Tingkat Capaian Kinerja sebesar 98,76%.

Outcome Kegiatan adalah Meningkatnya Persentase Kepatuhan dalam Pelaksanaan SOP Pelayanan Pemerintah.

Program ini dilaksanakan melalui Kegiatan dan Sub Kegiatan sebagai berikut :

- A. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Desa, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.4.224.500,00 (Empat juta dua ratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah) dan terealisasi sebesar

Rp.4.224.500,00 (Empat juta dua ratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah) sisa sebesar Rp.0,00

Tingkat Capaian Kinerja sebesar 100%.

Output Kegiatan adalah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja perangkat Daerah yang dihasilkan

- a. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah sebesar Rp.2.054.300,00 (Dua juta lima puluh empat ribu tiga ratus rupiah) dan terealisasi sebesar Rp.2.054.300,00 (Dua juta lima puluh empat ribu tiga ratus rupiah) sisa sebesar Rp.0,00.

Tingkat Capaian Kinerja sebesar 100%.

Output Sub Kegiatan adalah Jumlah Dokumen perencanaan yang dihasilkan

Outcome Sub Kegiatan adalah Meningkatnya Persentase Kepatuhan dalam Pelaksanaan SOP Pelayanan Pemerintah.

- b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD sebesar Rp.2.170.200,00 (Dua juta seratus tujuh puluh ribu dua ratus rupiah) dan terealisasi sebesar Rp.2.170.200,00 (Dua juta seratus tujuh puluh ribu dua ratus rupiah) sisa sebesar Rp.0,00 atau tercapai sebesar 100%.

Tingkat Capaian Kinerja sebesar 100%.

Output Sub Kegiatan adalah Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja

Outcome Sub Kegiatan adalah Meningkatnya Persentase Kepatuhan dalam Pelaksanaan SOP Pelayanan Pemerintah.

- B. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.2.125.870.800,00 (Dua Milyar seratus dua puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh ribu delapan ratus rupiah) dan terealisasi sebesar Rp.2.096.558.070,00 (Dua milyar Sembilan puluh enam juta lima ratus lima puluh delapan ribu tujuh puluh rupiah) sisa sebesar Rp.29.312.730,00 (Dua puluh Sembilan juta tiga ratus dua belas ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah)

Tingkat Capaian Kinerja sebesar 98,62%.

Output Kegiatan adalah Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat daerah yang dihasilkan

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN sebesar Rp.2.122.189.300,00 dan terealisasi sebesar Rp.2.092.876.570,00 (Dua milyar Sembilan puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh enam

ribu lima ratus tujuh puluh rupiah) sisa sebesar Rp.29.312.730,00 (Dua puluh Sembilan juta tiga ratus dua belas ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah)

Tingkat Capaian Kinerja sebesar 98,62%.

Output Sub Kegiatan adalah Jumlah Pegawai ASN yang terbayar Gaji dan Tunjangannya setiap bulan

Outcome Sub Kegiatan adalah Meningkatnya Persentase Kepatuhan dalam Pelaksanaan SOP Pelayanan Pemerintah.

- b. Sub Kegiatan Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD sebesar Rp.2.401.000,00 (Dua juta empat ratus satu ribu rupiah) dan terealisasi sebesar Rp.2.401.000,00 (Dua juta empat ratus satu ribu rupiah) sisa sebesar Rp.0,00

Tingkat Capaian Kinerja sebesar 100%.

Output Sub Kegiatan adalah Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun

Outcome Sub Kegiatan adalah Meningkatnya Persentase Kepatuhan dalam Pelaksanaan SOP Pelayanan Pemerintah.

- c. Sub Kegiatan Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan Bulanan/triwulanan/Semesteran SKPD sebesar Rp.1.280.500,00 (Satu juta dua ratus delapan ribu lima ratus rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. Rp.1.280.500,00 (Satu juta dua ratus delapan ribu lima ratus rupiah) sisa sebesar Rp. 0,00 Tingkat Capaian Kinerja sebesar 100%.

Output Sub Kegiatan adalah Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun yang dihasilkan

Outcome Sub Kegiatan adalah Meningkatnya Persentase Kepatuhan dalam Pelaksanaan SOP Pelayanan Pemerintah.

- C. Alokasi anggaran untuk Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sebesar Rp.0,00 dan terealisasi sebesar Rp.0,00 sisa sebesar Rp.0,00

Tingkat Capaian Kinerja sebesar 0.00 %.

Output Kegiatan adalah Jumlah Pegawai yang teradministrasi dengan baik.

- a. Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.0,00 dan terealisasi sebesar 0,00 sisa sebesar Rp.0,00

Tingkat Capaian Kinerja sebesar 0%.

Output -

Outcome -

- D. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.49.917.600,00 (Empat puluh Sembilan juta Sembilan ratus tujuh belas ribu enam ratus rupiah) dan terealisasi sebesar Rp.49.906.000,00 (Empat puluh Sembilan juta Sembilan ratus enam ribu rupiah) sisa sebesar Rp.11.600,00 (sebelas ribu enam ratus rupiah)

Tingkat Capaian Kinerja sebesar 99,98%.

Output Kegiatan adalah Jumlah Komponen Penunjang Kinerja Pelayanan.

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor sebesar Rp.2.308.200.00 (Dua juta tiga ratus delapan ribu dua ratus rupiah) dan terealisasi sebesar Rp.2.308.200,00 (Dua juta tiga ratus delapan ribu dua ratus rupiah) sisa sebesar Rp.0.00

Tingkat Capaian Kinerja sebesar 100%.

Output Sub Kegiatan adalah Jumlah instalasi listrik / penerangan Bangunan kantor yang disediakan

Outcome Sub Kegiatan adalah Meningkatnya Persentase Kepatuhan dalam Pelaksanaan SOP Pelayanan Pemerintah.

- b. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor sebesar Rp.24.165.000,00 (Dua puluh empat juta seratus enam puluh lima ribu rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 24.165.000,00 (Dua puluh empat juta seratus enam puluh lima ribu rupiah) sisa sebesar Rp.0,00

Tingkat Capaian Kinerja sebesar 100%.

Output Sub Kegiatan adalah Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor yang di sediakan

Outcome Sub Kegiatan adalah Meningkatnya Persentase Kepatuhan dalam Pelaksanaan SOP Pelayanan Pemerintah.

- c. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp.3.920.000,00 (Tiga juta Sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) dan terealisasi sebesar Rp.3.920.000,00 (Tiga juta Sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) sisa sebesar Rp.0,00

Tingkat Capaian Kinerja sebesar 100%.

Output Sub Kegiatan adalah Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan

Outcome Sub Kegiatan adalah Meningkatnya Persentase Kepatuhan dalam Pelaksanaan SOP Pelayanan Pemerintah.

- d. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.804.000,00 (Tiga juta delapan ratus empat ribu rupiah) dan terealisasi sebesar Rp.3.804.000,00 (Tiga juta

delapan ratus empat ribu rupiah) sisa sebesar Rp.0,00

Tingkat Capaian Kinerja sebesar 100%.

Output Sub Kegiatan adalah Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan

Outcome Sub Kegiatan adalah Meningkatnya Persentase Kepatuhan dalam Pelaksanaan SOP Pelayanan Pemerintah.

- e. Sub Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.2.016.000,00 (Dua juta enam belas ribu rupiah) dan terealisasi sebesar Rp.2.016.000,00 (Dua juta enam belas ribu rupiah) sisa sebesar Rp.0,00

Tingkat Capaian Kinerja sebesar 100%.

Output Sub Kegiatan adalah Jumlah bahan bacaan yang disediakan

Outcome Sub Kegiatan adalah Meningkatnya Persentase Kepatuhan dalam Pelaksanaan SOP Pelayanan Pemerintah.

- f. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material dengan alokasi anggaran sebesar Rp.9.204.400,00 (Sembilan juta dua ratus empat ribu empat ratus rupiah) dan terealisasi sebesar Rp.9.192.800,00 (Sembilan juta seratus Sembilan puluh dua ribu delapan ratus rupiah) sisa sebesar Rp.11.600,00 (sebelas ribu enam ratus rupiah)

Tingkat Capaian Kinerja sebesar 99,87%.

Output Sub Kegiatan adalah Jumlah Bahan/Material yang disediakan

Outcome Sub Kegiatan adalah Meningkatnya Persentase Kepatuhan dalam Pelaksanaan SOP Pelayanan Pemerintah.

- g. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp.4.500.000,00 (Empat juta lima ratus ribu rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 4.500.000,00 (Empat juta lima ratus ribu rupiah) sisa sebesar Rp 0,00

Tingkat Capaian Kinerja sebesar 100%.

Output Sub Kegiatan adalah Jumlah Laporan hasil perjalanan dinas (dalam daerah)

Outcome Sub Kegiatan adalah Meningkatnya Persentase Kepatuhan dalam Pelaksanaan SOP Pelayanan Pemerintah.

- E. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.27.511.328,00 (Dua puluh tujuh juta lima ratus sebelas ribu tiga ratus dua puluh delapan rupiah) dan terealisasi sebesar Rp.27.469.600,00 (Dua puluh tujuh juta empat ratus enam puluh Sembilan ribu enam ratus rupiah) sisa sebesar Rp.41.728 (Empat puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah)

Tingkat Capaian Kinerja sebesar 99.84%.

Output Kegiatan adalah Jumlah Jasa Penunjang urusan Pemerintah Daerah yang dibayarkan/dilaksanakan.

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 25.321.328,00 (Dua puluh lima juta tiga ratus dua puluh satu ribu tiga ratus dua puluh delapan rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 25.279.600,00 (Dua puluh lima juta dua ratus tujuh puluh Sembilan ribu enam ratus rupiah) sisa sebesar Rp.41.728,00 (empat puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah).

Tingkat Capaian Kinerja sebesar 99.84%.

Output Sub Kegiatan adalah Jumlah rekening yang dibayarkan

Outcome Sub Kegiatan adalah Meningkatnya Persentase Kepatuhan dalam Pelaksanaan SOP Pelayanan Pemerintah.

- b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp.2.190.000,00 (Dua juta seratus Sembilan puluh ribu rupiah) dan terealisasi sebesar Rp.2.190.000,00 (Dua juta seratus Sembilan puluh ribu rupiah) sisa sebesar Rp.0,00

Tingkat Capaian Kinerja sebesar 100%.

Output Sub Kegiatan adalah Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan

Outcome Sub Kegiatan adalah Meningkatnya Persentase Kepatuhan dalam Pelaksanaan SOP Pelayanan Pemerintah.

- F. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.277.718.100,00 (Dua ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus delapan belas ribu seratus rupiah) dan terealisasi sebesar Rp.276.260.900,00 (Dua ratus tujuh puluh enam juta dua ratus enam puluh ribu Sembilan ratus rupiah) sisa sebesar Rp.1.457.200,00 (Satu juta empat ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus rupiah)

Tingkat Capaian Kinerja sebesar 99.48%.

Output Sub Kegiatan adalah Jumlah Barang Milik daerah yang dipelihara.

Outcome Sub Kegiatan adalah Meningkatnya Persentase Kepatuhan dalam Pelaksanaan SOP Pelayanan Pemerintah.

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.36.180.000,00 (Tiga puluh enam juta seratus delapan belas ribu rupiah) terealisasi sebesar

Rp.36.180.000,00 (Tiga puluh enam juta seratus delapan belas ribu rupiah) sisa sebesar Rp.0,00

Tingkat Capaian Kinerja sebesar 100%.

Output Sub Kegiatan adalah Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara

Outcome Sub Kegiatan adalah Meningkatnya Persentase Kepatuhan dalam Pelaksanaan SOP Pelayanan Pemerintah.

- b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.2.459.500,00 (Dua juta empat ratus lima puluh Sembilan ribu lima ratus rupiah) terealisasi sebesar Rp.1.252.300,00 (Satu juta dua ratus lima puluh dua ribu tiga ratus rupiah) sisa sebesar Rp.1.207.200,00 (Satu juta dua ratus tujuh ribu dua ratus rupiah)

Tingkat Capaian Kinerja sebesar 50,92%.

Output Sub Kegiatan adalah Jumlah kendaraan Dinas Operasional yang dibayarkan pajak dan jasa pemeliharaannya

Outcome Sub Kegiatan adalah Meningkatnya Persentase Kepatuhan dalam Pelaksanaan SOP Pelayanan Pemerintah.

- c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 38.268.800,00 (Tiga puluh delapan juta dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 38.268.800,00 (Tiga puluh delapan juta dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah) sisa sebesar Rp.0,00

Tingkat Capaian Kinerja sebesar 100%.

Output Sub Kegiatan adalah Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Outcome Sub Kegiatan adalah Meningkatnya Persentase Kepatuhan dalam Pelaksanaan SOP Pelayanan Pemerintah.

- d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 200.809.800,00 (Dua ratus juta delapan ratus Sembilan ribu delapan ratus rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 200.559.800,00 (Dua ratus juta lima ratus lima puluh Sembilan ribu delapan ratus rupiah) sisa sebesar Rp.250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Tingkat Capaian Kinerja sebesar 99,88%.

Output Sub Kegiatan adalah Terlaksananya .Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Outcome Sub Kegiatan adalah Meningkatnya Persentase Kepatuhan dalam Pelaksanaan SOP Pelayanan Pemerintah.

(2) PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

Alokasi anggaran untuk Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik sebesar Rp.111.246.600,00 (Seratus sebelas juta dua ratus empat puluh enam ribu enam ratus rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 110.996.600,00 (Seratus sepuluh juta Sembilan ratus Sembilan puluh enam ribu enam ratus rupiah) sisa sebesar Rp.250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Tingkat Capaian Kinerja sebesar 99,77%.

Outcome Kegiatan adalah Prosentase Peningkatan Pelimpahan Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.

Program ini dilaksanakan melalui Kegiatan dan sub Kegiatan sebagai berikut :

A. Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.52.416.800,00 (Lima puluh dua juta empat ratus enam belas ribu delapan ratus rupiah) dan terealisasi sebesar Rp.52.416.800,00 (Lima puluh dua juta empat ratus enam belas ribu delapan ratus rupiah) sisa sebesar Rp.0,00

Tingkat Capaian Kinerja sebesar 100%.

Output Kegiatan adalah Jumlah Koorinasi Penyelenggaraan Pemerintah ditingkat Kecamatan.

a. Sub Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 22.500.000,00 (Dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 22.500.000,00 (Dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) sisa sebesar Rp.0,00.

Tingkat Capaian Kinerja sebesar 100%.

Output Sub Kegiatan adalah Jumlah Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Outcome Sub Kegiatan adalah Persentase Peningkatan Pelimpahan Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.

- b. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 29.916.800,00 (Dua puluh Sembilan juta Sembilan ratus enam belas ribu delapan ratus rupiah) dan terealisasi sebesar Rp. 29.916.800,00 (Dua puluh Sembilan juta Sembilan ratus enam belas ribu delapan ratus rupiah) sisa sebesar Rp.0,00.

Tingkat Capaian Kinerja sebesar 100%.

Output Sub Kegiatan adalah Jumlah Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Outcome Sub Kegiatan adalah Persentase Peningkatan Pelimpahan Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.

- B. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.5.583.800,00 (Lima juta lima ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus rupiah) dan terealisasi sebesar Rp.5.333.800,00 (Lima juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus rupiah) sisa sebesar Rp. 250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Tingkat Capaian Kinerja sebesar 91,36%.

Output Kegiatan adalah Jumlah Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan Kecamatan yang tidak dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.

- a. Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.5.583.800,00 (Lima juta lima ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus rupiah) dan terealisasi sebesar Rp.5.333.800,00 (Lima juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus rupiah) sisa sebesar Rp.250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Tingkat Capaian Kinerja sebesar 91,36%.

Output Sub Kegiatan adalah Jumlah Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan

Outcome Sub Kegiatan adalah Persentase Peningkatan Pelimpahan Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.

- C. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat dengan alokasi anggaran sebesar Rp.53.246.000,00 (Lima puluh tiga juta dua ratus empat puluh enam ribu rupiah) dan terealisasi sebesar Rp.53.246.000,00 (Lima puluh tiga juta dua ratus empat puluh enam ribu rupiah) sisa sebesar Rp.0,00.

Tingkat Capaian Kinerja sebesar 100%.

Output Kegiatan adalah Jumlah Jenis urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat

Outcome Kegiatan adalah Persentase Peningkatan Pelimpahan Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.

- a. Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.53.246.000,00 (Lima puluh tiga juta dua ratus empat puluh enam ribu rupiah) dan terealisasi sebesar Rp.53.246.000,00 (Lima puluh tiga juta dua ratus empat puluh enam ribu rupiah) sisa sebesar Rp.0,00.

Tingkat Capaian Kinerja sebesar 100%.

Output Sub Kegiatan adalah Jumlah Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan dari Bupati kepada Camat

Outcome Sub Kegiatan adalah Persentase Peningkatan Pelimpahan Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.

(3) PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

Alokasi anggaran untuk Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik sebesar Rp.32.707.600,00 (Tiga puluh dua juta tujuh ratus tujuh ribu enam ratus rupiah) dan terealisasi sebesar Rp.32.707.600,00 (Tiga puluh dua juta tujuh ratus tujuh ribu enam ratus rupiah) sisa sebesar Rp.0,00.

Tingkat Capaian Kinerja sebesar 100%.

Outcome Kegiatan adalah Persentase Jumlah Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dilaksanakan.

Program ini dilaksanakan melalui kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

- A. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa dengan alokasi anggaran sebesar Rp.32.707.600,00 (Tiga puluh dua juta tujuh ratus tujuh ribu enam ratus rupiah) dan terealisasi sebesar Rp.32.707.600,00 (Tiga puluh dua juta tujuh ratus tujuh ribu enam ratus rupiah) sisa sebesar Rp.0,00.

Tingkat Capaian Kinerja sebesar 100%.

Output Kegiatan adalah Jumlah Jenis Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa.

- a. Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp.32.707.600,00 (Tiga puluh dua juta tujuh ratus tujuh ribu enam ratus rupiah) dan terealisasi sebesar Rp.32.707.600,00 (Tiga puluh dua juta tujuh ratus tujuh ribu enam ratus rupiah) sisa sebesar Rp.0,00.

Tingkat Capaian Kinerja sebesar 100%.

Output Sub Kegiatan adalah Jumlah Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

Outcome Sub Kegiatan adalah Persentase Jumlah Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dilaksanakan.

(4) PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Alokasi anggaran untuk Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum sebesar Rp.47.711.800,00 (Empat puluh satu juta tujuh ratus sebelas ribu delapan ratus rupiah) dan terealisasi sebesar Rp.47.711.800,00 (Empat puluh satu juta tujuh ratus sebelas ribu delapan ratus rupiah) sisa sebesar Rp.0,00.

Tingkat Capaian Kinerja sebesar 100%.

Outcome Kegiatan adalah Persentase Peningkatan Kegiatan Koordinasi untuk Meningkatkan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

Program ini dilaksanakan melalui kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

A. Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dengan alokasi anggaran sebesar Rp.47.711.800,00 (Empat puluh satu juta tujuh ratus sebelas ribu delapan ratus rupiah) dan terealisasi sebesar Rp.47.711.800,00 (Empat puluh satu juta tujuh ratus sebelas ribu delapan ratus rupiah) sisa sebesar Rp.0,00.

Tingkat Capaian Kinerja sebesar 100%.

Output Kegiatan adalah Jumlah Rapat Koordinasi dalam Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

a. Sub Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.47.711.800,00 (Empat puluh satu juta tujuh ratus sebelas ribu delapan ratus rupiah) dan terealisasi sebesar Rp.47.711.800,00 (Empat puluh satu juta tujuh ratus sebelas ribu delapan ratus rupiah) sisa sebesar Rp.0,00.

Tingkat Capaian Kinerja sebesar 100%.

Output Sub Kegiatan adalah Jumlah Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan

Outcome Sub Kegiatan adalah Persentase Peningkatan Kegiatan Koordinasi untuk Meningkatkan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

(5) PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

Alokasi anggaran untuk Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sebesar Rp.100.000.000,00 (Seratus juta Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp.76.617.000,00 (Tujuh puluh enam juta enam ratus tujuh belas ribu rupiah) sisa sebesar Rp.23.383.000 (Dua puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu rupiah).

Tingkat Capaian Kinerja sebesar 76,61%.

Outcome Kegiatan adalah Persentase Jumlah Urusan Pemerintahan Umum yang ditugaskan Kepala Pemerintah Daerah Kepada Camat.

Program ini dilaksanakan melalui kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

A. Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dengan alokasi anggaran Rp.100.000.000,00 (Seratus juta Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp.76.617.000,00 (Tujuh puluh enam juta enam ratus tujuh belas ribu rupiah) sisa sebesar Rp.23.383.000 (Dua puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu rupiah).

Tingkat Capaian Kinerja sebesar 76,61%.

Output Kegiatan adalah Jumlah Jenis Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah.

Outcome Kegiatan adalah Persentase Jumlah Urusan Pemerintahan Umum yang ditugaskan Kepala Pemerintah Daerah Kepada Camat.

a. Sub Kegiatan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional, dengan alokasi anggaran sebesar Rp.100.000.000,00 (Seratus juta Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp.76.617.000,00 (Tujuh puluh enam juta enam ratus tujuh belas ribu rupiah) sisa sebesar Rp.23.383.000 (Dua puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu rupiah).

b. Tingkat Capaian Kinerja sebesar 76,61%.

Tingkat Capaian Kinerja sebesar 100%.

Output Sub Kegiatan adalah Jumlah Fasilitasi dan Pembinaan tentang Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional

Outcome Sub Kegiatan adalah Persentase Jumlah Urusan Pemerintahan Umum yang di Tugaskan Kepala Pemerintahan Daerah Kepada Camat.

(6) PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

Alokasi anggaran untuk Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa sebesar Rp.0,00 dan terealisasi sebesar Rp.,00 sisa sebesar Rp.0,00.

Tingkat Capaian Kinerja sebesar 0,00%.

Outcome Kegiatan adalah Peningkatan Persentase Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Pemerintahan Desa.

Program ini dilaksanakan melalui kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

- A. Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan alokasi anggaran sebesar Rp.0,00 dan terealisasi sebesar Rp.0,00 sisa sebesar Rp.0,00.

Tingkat Capaian Kinerja sebesar 0,00%.

Output -

- a. Sub Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sebesar Rp.0,00 terealisasi sebesar Rp.0,00 sisa sebesar Rp.0,00.

Tingkat Capaian Kinerja sebesar 0,00%.

Output -

Outcome -

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Kecamatan Babakan dan Pencapaian Renstra Kecamatan Babakan s.d Tahun 2022 Kabupaten Cirebon

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Babakan

Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan Tahun 2022	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Kecamatan Babakan) Tahun 2023	Realisasi Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d dengan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja Kecamatan Babakan Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Kecamatan Babakan s.d Tahun 2023	
				Target Renja Kecamatan Babakan Tahun 2022	Realisasi Renja Kecamatan Babakan Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%) Tahun 2022		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d Tahun 2024 Berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) Tahun 2024
	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Meningkatnya prosentase ketaatan dalam pelaksanaan SOP pelayanan Pemerintah								
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen perencanaan yang dihasilkan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang dihasilkan	3 Laporan	3 Laporan	3 Dokumen	3 Dokumen	100	3 Laporan	3 Dokumen	3 Dokumen
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Pegawai ASN yang terbayar Gaji dan tunjagannya setiap bulan.	13 Pegawai	13 Pegawai	13 Pegawai	13 Pegawai	100	13 Pegawai	13 Pegawai	13 Pegawai
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun yang dihasilkan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah dokumen laporan keuangan yang dihasilkan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Pakaian Dinas beserta Perengkapannya	35 Stel	-	35 Stel	35 Stel	100	35 Stel	35 Stel	35 Stel
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah instalasi listrik/penerangan Bangunan kantor yang disediakan	20 Jenis	20 Jenis	20 Jenis	20 Jenis	100	20 Jenis	20 Jenis	20 Jenis
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor yang di sediakan	9 Jenis	9 Jenis	9 Jenis	9 Jenis	100	9 Jenis	9 Jenis	9 Jenis
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	15 Paket	15 Paket	15 Paket	15 Paket	100	15 Paket	15 Paket	15 Paket
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	100	3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis
	Jumlah bahan bacaan yang disediakan	2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	100	2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis

Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Bahan/Material yang disediakan	2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPP	Jumlah Laporan hasil perjalanan dinas (dalam daerah)	50 Kali	50 Kali	50 Kali	50 Kali	50 Kali	50 Kali	50 Kali	50 Kali	50 Kali	50 Kali
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung kantor yang diadakan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening yang dibayarkan	12 Rekening	12 Rekening	12 Rekening	12 Rekening	12 Rekening	12 Rekening	12 Rekening	12 Rekening	12 Rekening	12 Rekening
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	5 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit	5 Unit
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara	10 Unit	10 Unit	10 Unit	10 Unit	10 Unit	10 Unit	10 Unit	10 Unit	10 Unit	10 Unit
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan											
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan Dinas Operasional yang dibayarkan pajak dan jasa pemeliharannya	10 Unit	10 Unit	10 Unit	10 Unit	10 Unit	10 Unit	10 Unit	10 Unit	10 Unit	10 Unit
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tertaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	3 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang dipelihara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Peningkatan Pelimpahan Efektifitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen
Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 BA	1 BA	1 BA	1 BA	1 BA	1 BA	1 BA	1 BA	1 BA	1 BA
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Monitoring dan Evaluasi Kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan	25 Kegiatan	25 Kegiatan	25 Kegiatan	25 Kegiatan	25 Kegiatan	25 Kegiatan	25 Kegiatan	25 Kegiatan	25 Kegiatan	25 Kegiatan
Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	15 Dokumen	15 Dokumen	15 Dokumen	15 Dokumen	15 Dokumen	15 Dokumen	15 Dokumen	15 Dokumen	15 Dokumen	15 Dokumen
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Nonperizinan yang dilaksanakan	6 Kegiatan	6 Kegiatan	6 Kegiatan	6 Kegiatan	6 Kegiatan	6 Kegiatan	6 Kegiatan	6 Kegiatan	6 Kegiatan	6 Kegiatan
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lam yang Dilimpahkan	Jumlah Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan dari Bupati kepada Camat.	10 Kegiatan	10 Kegiatan	10 Kegiatan	10 Kegiatan	10 Kegiatan	10 Kegiatan	10 Kegiatan	10 Kegiatan	10 Kegiatan	10 Kegiatan
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase jumlah Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dilaksanakan	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	15 Kegiatan	15 Kegiatan	15 Kegiatan	15 Kegiatan	15 Kegiatan	15 Kegiatan	15 Kegiatan	15 Kegiatan	15 Kegiatan	15 Kegiatan
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Prosentase peningkatan Kegiatan Koordinasi untuk meningkatkan Ketertarikan dan Ketertiban Umum	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan

Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Koordinasi dalam rangka penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan	15 Kegiatan	15 Kegiatan	15 Kegiatan	100	15 Kegiatan	15 Kegiatan	15 Kegiatan
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Prosentase jumlah urusan pemerintahan umum yang di tugaskan kepala pemerintah daerah kepada camat	-	100	-	100	-	-	-
Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Rapat / Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	-	-	-	-	-	-	-
Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Fasilitasi dan Pembinaan tentang Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	-	3 Kegiatan	-	-	-	3 Kegiatan	-
Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Kegiatan Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa yang dilaksanakan	-	-	-	-	-	-	-
Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Pembinaan Kerukunan Antar suku, Umat beragama, Ras dan golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas keamanan Lokal , Regional dan Nasional.	-	-	-	-	-	-	-
Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Rapat / Kegiatan Forum Koordinasi Pimpinan Tingkat Kecamatan	-	-	-	-	-	-	-
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Peningkatan Persentase kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan desa	100 Persen	-	-	-	-	-	-
Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pemilihan Kuwu)	-	4 Laporan	-	-	-	-	-
Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Pemberdayaan.	6 Laporan	-	-	-	-	-	-

2.2. ANALISA KINERJA PELAYANAN KECAMATAN BABAKAN

Secara umum, sebagian besar pelayanan di Kantor Kecamatan Babakan dapat berjalan sesuai dengan target. Keuangan sebagai salah satu sumber daya instansi merupakan aspek penting dalam menunjang pelayanan yang dilaksanakan oleh SKPD. Kinerja pelayanan suatu SKPD turut dipengaruhi oleh kapasitas keuangan di dalam SKPD tersebut. Jumlah anggaran Kantor Kecamatan Babakan dalam 5 (lima) tahun terakhir mengalami pasang surut disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi keuangan daerah Kabupaten Cirebon. Pengelolaan pendanaan pelayanan Kecamatan Babakan dalam pelaksanaan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2019 - 2024

Kondisi masyarakat yang selalu dinamis menuntut adanya pelayanan publik yang prima dan berkembang sesuai tuntutan perubahan waktu. Kondisi lingkungan eksternal ini akan berimplikasi sebagai peluang dan tantangan bagi pengembangan pelayanan SKPD pada 5 (lima) tahun mendatang. Analisis lingkungan eksternal tersebut dilakukan salah satunya melalui telaahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Cirebon. Untuk analisis Renstra K/L, SKPD Provinsi dan dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten Cirebon tidak dapat dilakukan karena ketidaksediaan data.

Telaahan RTRW ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan Kantor Kecamatan Babakan berupa arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan dalam 5 (lima) tahun mendatang

Berkaitan dengan tugas pokok dan kewenangan yang ada di kecamatan maka pada kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan terdapat banyak peluang dan tantangan pelayanan yang harus dilaksanakan oleh pihak Kecamatan Babakan. Peluang dan tantangan terbesar ke depan adalah terkait rencana pengembangan kawasan industri menengah di Kecamatan Babakan. Sebagai pusat Kegiatan Lokal, yang memerlukan pembangunan sarana dan prasarana serta dampaknya terkait dengan pelayanan yang terdapat di Kecamatan Babakan.

Peluang dan tantangan pelayanan tersebut harus dilaksanakan dalam rangka perwujudan pola ruang yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kecamatan Babakan, yaitu antara lain :

1. Fasilitasi dan Koordinasi Penanggulangan Masalah Sosial.
2. Monitoring dan Inventarisasi Data Jalan Umum dan Jalan Lingkungan serta Data Drainase.
3. Pengawasan Kebersihan Lingkungan.
4. Inventarisir Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan
5. Fasilitasi Dan Koordinasi Monitoring dan Inventarisasi Data Pemukiman yang Belum Memiliki Listrik
6. Pelayanan Fasilitasi dan Koordinasi Monitoring dan Inventarisasi Data Tata Bangunan,
7. Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Wilayah, Serta
8. Fasilitasi Pendataan dan Pembinaan Usaha Formal.

Peluang dan tantangan pengembangan pelayanan tersebut diarahkan di seluruh Desa di Kecamatan Babakan.

Pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Babakan yang disesuaikan menurut perangkat daerah masing-masing sebagai berikut :

Tabel 2.2

**Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Babakan
Kabupaten Cirebon**

Indikator Tahun 2019-2022	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Kecamatan Babakan		Realisasi Capaian		Indikator Tahun 2021 dan 2023	Target Renstra Kecamatan Babakan		Proyeksi		Catatan Analisis
			Tahun 2019	Tahun 2022	Tahun 2019	Tahun 2022		Tahun 2022	Tahun 2024	Tahun 2022	Tahun 2024	
BELANJA LANGSUNG							NON URUSAN					
							NON BIDANG URUSAN					
							PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH					
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran							Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					
Terbayarnya jasa penyedia Listrik			12 Bulan	1 Rekening	12 Bulan	1 Rekening	Jumlah Dokumen perencanaan yang dihasilkan	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	
Terbayarnya jasa penyedia perijinan Kendaraan Dinas/ Oprasional			11 Unit	11 Unit	11 Unit	11 unit	Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD yang dihasilkan	3 Dok	3 Dok	3 Dok	3 Dok	
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja			7 Jenis	4 Jenis	7 Jenis	4 Jenis	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					
Tersedianya alat tulis kantor secara mencukupi			17 Jenis	1 Paket	17 Jenis	1 Paket	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	13 Pegawai	13 Pegawai	13 Pegawai	13 Pegawai	
Tersedianya barang cetakan dan penggandaan sesuai kebutuhan			7 Jenis	1 Eksempler	7 Jenis	1 Eksempler	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	
Tersedianya komponen instalasi listrik sesuai kebutuhan			7 Jenis	20 Jenis	7 Jenis	20 Jenis	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	
Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor			7 Jenis	6 Jenis	7 Jenis	6 Jenis	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					
Tersedianya peralatan rumah tangga			-	7 Jenis	-	7 Jenis	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut kelengkapannya	35 Stel	35 Stel	35 Stel	35 Stel	
Tersedianya Bahan Bacaan			5 Media	5 Media	5 Media	5 Media	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	-	-	-	-	
Tersedianya makanan dan minuman untuk tamu			12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	Bimbingan Teknis implementasi Peraturan Perundang-undangan	-	-	-	-	
Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah			125 laporan	264 laporan	125 laporan	264 laporan	Administrasi Umum Perangkat Daerah					
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur							Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20 Jenis	20 Jenis	20 Jenis	20 Jenis	
Terbangunnya gedung kantor			-	1 Unit	-	1 Unit	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9 Jenis	9 Jenis	9 Jenis	9 Jenis	
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional			-	-	-	-	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	-	-	-	-	

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Isu - Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang diperhatikan dalam perencanaan pembangunan selama 5 (lima) tahun dalam melaksanakan atau menyelenggarakan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Babakan kepada masyarakat. Analisa isu - isu strategis di identifikasikan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Babakan dalam menjalankan pemerintahan ada berbagai permasalahan, sebagai berikut :

a. Bidang Sekretariat

1. Sarana dan prasarana komputer di wilayah Kecamatan Babakan masih kurang memadai sehingga memperlambat kinerja kegiatan administrasi perkantoran, untuk meningkatkan kinerja kegiatan administrasi perlu Bangunan yang memadai dan menunjang serta perlu adanya penambahan perangkat computer;
2. Kurangnya pegawai yang berstatus PNS di sekretariat Kantor Kecamatan Babakan, sehingga banyak tenaga yang merangkap tugas lain atau menjadi penjabat kuwu, untuk meningkatkan kinerja pelayanan masyarakat perlu adanya Pegawai.
3. Kecamatan merupakan salah satu unit Satuan Kerja Perangkat Daerah yang masih kurang Anggaran untuk di kelola oleh Kecamatan sehingga tidak maksimalnya pelayanan terhadap masyarakat karena tidak adanya pendukung terpenuhinya sarana dan prasarana yang memadai

b. Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Sosial

1. Pembangunan Infrastruktur di Kecamatan Babakan sudah cukup baik, namun hal ini perlu ditingkatkan keberadaannya, khususnya untuk infrastruktur jalan kabupaten dan jalan poros desa perlu adanya pembangunan dan pemeliharaan rutin karena merupakan tanggungjawab pemerintah kabupaten Cirebon
2. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan;
3. Masih rendahnya pengetahuan masyarakat dalam teknologi IT dan pembangunan, sehingga perlu adanya pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan;
4. Tingginya kerusakan infrastruktur wilayah desa seperti jalan lingkungan, sanitasi lingkungan masih rendah dan pengelolaan persampahan yang belum optimal;
5. Kurangnya pemerataan pembangunan wilayah Desa dan Belum optimalnya peran serta dan swadaya masyarakat dalam pemberdayaan dan pembangunan wilayah;
6. Pemutakhiran data yang kurang akurat untuk mengembangkan perencanaan pembangunan.
7. Masih rendahnya hubungan kemitraan dengan masyarakat;

8. Kurangnya koordinasi dengan dinas sosial tentang pemberian bantuan untuk masyarakat;
9. Pemutakiran data penerima bantuan yang kurang akurat.

c. Bidang Tata Pemerintahan

1. Seiring dengan adanya perubahan peraturan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah membawa dampak yang cukup signifikan dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah, peran kecamatan hanya bersifat Fasilitasi dan koordinasi tidak lagi sebagai kepala wilayah;
2. Masih rendahnya kapasitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan desa;
3. Masih rendahnya kinerja dan akuntabilitas aparatur Desa;
4. Masih rendahnya pengetahuan masyarakat dan aparatur Desa dalam teknologi IT dan pembangunan, sehingga perlu adanya pemberdayaan masyarakat dan Aparatur Desa untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan.

d. Bidang Pelayanan Umum

1. Masih kurangnya pelayanan publik terhadap masyarakat sehingga masyarakat belum puas;
2. Sarana dan prasarana terutama peralatan komputer yang sudah lama dan perlu diganti serta jaringan untuk penanganan sistem kependudukan masih sering terjadi gangguan.
3. Sarana dan prasarana penunggu pemohon yang kurang memadai.

e. Bidang Ketenteraman dan Ketertiban

1. Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang hukum;
2. Kurangnya sarana dan prasarana Kamtibmas di Kantor Kecamatan Babakan;
3. Pengetahuan SDM anggota Linmas masih rendah sehingga perlu adanya pembinaan dalam melaksanakan tugas dalam rangka meningkatkan keamanan dan ketertiban umum;
4. Masih tingginya gangguan atau pelanggaran masyarakat.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal RKPD Kecamatan Babakan Tahun 2024 disusun berdasarkan Renstra Tahun 2019 - 2024 dengan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan dalam mendukung pencapaian RPJMD Kabupaten Cirebon Tahun 2019 – 2024.

Tabel 2.3
Review terhadap Rancangan Awal SKPD Tahun 2022

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Lokasi	Target Capaian Kinerja			Rencana Tahun 2022			Kebutuhan Dana / Pagu		Asal Ajuan	
				Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	6	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah /	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (8-7)	10	11			
7.	UNSUR KEWILAYAHAN												
7.01.	KECAMATAN												
7.01.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran yang sesuai pelayanan prima		100 Prosen	100 Prosen	2.803.568.418	2.847.588.418	44.020.000					
7.01.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat		1 BA	1 BA	4.224.500	4.224.500	-					
7.01.01.01.2.01.01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Sektoral	Jalan Raya Babakan Nomor : 03 (Desa Babakan - Kecamatan babakan)	2 Dok	1 Dok	2.054.300	2.054.300	-	PIS	PIS			
		Jumlah Dokumen perencanaan yang dihasilkan	Jalan Raya Babakan Nomor : 03 (Desa Babakan - Kecamatan babakan)	2 Dok	2 Dok	-	-	-					
7.01.01.01.2.01.04.	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Terlaksananya in house training	Jalan Raya Babakan Nomor : 03 (Desa Babakan - Kecamatan babakan)	0 Kegiatan	0 Kegiatan	-	-	-					
		Jumlah Dokumen DPA yang dihasilkan	Jalan Raya Babakan Nomor : 03 (Desa Babakan - Kecamatan babakan)	0 Kegiatan	0 Kegiatan	-	-	-					
7.01.01.01.2.01.06.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Jalan Raya Babakan Nomor : 03 (Desa Babakan - Kecamatan babakan)	2 dok	1 dok	2.170.200	2.170.200	-	PIS	PIS		PIS	

		Jumlah Pakian Dinas berserta Perlengkapannya.	Jalan Raya Babakan Nomor : 03 (Desa Babakan - Kecamatan babakan)	28 Stell	-	-	-	-	
7.01.01.01.2.0 5 .10.	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya pembinaan aparatur kecamatan Babakan	Jalan Raya Babakan Nomor : 03 (Desa Babakan - Kecamatan babakan)	0 Kegiatan	-	-	-	-	
		Terlaksananya pembinaan aparatur kecamatan Babakan.	Jalan Raya Babakan Nomor : 03 (Desa Babakan - Kecamatan babakan)	0 Kegiatan	-	-	-	-	
7.01.01.01.2.0 5 .11.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Adanya aparatur perencanaan yang mengikuti diklat perencanaan	Jalan Raya Babakan Nomor : 03 (Desa Babakan - Kecamatan babakan)	0 Kegiatan	-	-	-	-	
		Adanya aparatur perencanaan yang mengikuti diklat perencanaan.	Jalan Raya Babakan Nomor : 03 (Desa Babakan - Kecamatan babakan)	0 Kegiatan	-	-	-	-	
7.01.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jalan Raya Babakan Nomor : 03 (Desa Babakan - Kecamatan babakan)	1 BA	49.917.600	49.917.600			
7.01.01.01.2.0 6 .01.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik sesuai kebutuhan	Jalan Raya Babakan Nomor : 03 (Desa Babakan - Kecamatan babakan)	4 Jenis	2.308.200	2.308.200	2.308.200	PIS	P I S
		Jumlah instalasi listrik/penerangan Bangunan kantor yang disediakan	Jalan Raya Babakan Nomor : 03 (Desa Babakan - Kecamatan babakan)	6 Jenis	-	-	-	-	
7.01.01.01.2.0 6 .02.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Jalan Raya Babakan Nomor : 03 (Desa Babakan - Kecamatan babakan)	5 Jenis	24.165.000	24.165.000	24.165.000	PIS	P I S
		Tersedianya Komputer dan jaringan untuk mendukung pelayanan	Jalan Raya Babakan Nomor : 03 (Desa Babakan - Kecamatan babakan)	0 Unit	-	-	-	-	
		Tersedianya UPS	Jalan Raya Babakan Nomor : 03 (Desa Babakan - Kecamatan babakan)	0 Unit	-	-	-	-	
		Jumlah Peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Jalan Raya Babakan Nomor : 03 (Desa Babakan - Kecamatan babakan)	6 Jenis	-	-	-	-	

7.01.01.01.2.0 6 .09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	Jalan Raya Babakan Nomor : 03 (Desa Babakan - Kecamatan babakan)	266 Perjalanan Dinas	186 Perjalanan Dinas	4.500.000	4.500.000	4.500.000	PIS	PIS
		Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	Jalan Raya Babakan Nomor : 03 (Desa Babakan - Kecamatan babakan)		12 Bulan	-	-	-		
7.01.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah		1 BA	1 BA	277.718.100	277.718.100	277.718.100		
		Jumlah barang milik daerah yang diadakan			5 Jenis	-	-	-		
7.01.01.01.2.0 7 .02.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya kendaraan dinas/operasional	Jalan Raya Babakan Nomor : 03 (Desa Babakan - Kecamatan babakan)	1 Unit	0 Unit	-	-	-		
		Jumlah kendaraan Dinas operasional atau Lapangan yang diadakan	Jalan Raya Babakan Nomor : 03 (Desa Babakan - Kecamatan babakan)		0 Unit	-	-	-		
7.01.01.01.2.0 7 .05.	Pengadaan Mebel	Tersedianya mebeleur	Jalan Raya Babakan Nomor : 03 (Desa Babakan - Kecamatan babakan)	1 Paket	0 Paket	-	-	-		
		jumlah mebel yang diadakan	Jalan Raya Babakan Nomor : 03 (Desa Babakan - Kecamatan babakan)		0 Jenis	-	-	-		
7.01.01.01.2.0 7 .06.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan gedung kantor	Jalan Raya Babakan Nomor : 03 (Desa Babakan - Kecamatan babakan)	1 Paket	0 Paket	-	-	-		
		Jumlah Peralatan dan Mesin yang diadakan	Jalan Raya Babakan Nomor : 03 (Desa Babakan - Kecamatan babakan)		0 Paket	-	-	-		
7.01.01.01.2.0 7 .10.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung kantor dan Bangunan Lainnya	Jalan Raya Babakan Nomor : 03 (Desa Babakan - Kecamatan babakan)	1 paket	0 paket	-	-	-	PIS	PIS
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung kantor yang diadakan	Jalan Raya Babakan Nomor : 03 (Desa Babakan - Kecamatan babakan)		0 Unit	-	-	-		

7.01.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 BA	1 BA	1 BA	18.389.718	18.389.718	-		
7.01.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya jasa penyedia Listrik	1 Rekening	1 Rekening	Jalan Raya Babakan Nomor : 03 (Desa Babakan - Kecamatan babakan)	16.199.718	16.199.718	-	PIS	PIS
		Jumlah rekening yang dibayarkan	1 Rekening		Jalan Raya Babakan Nomor : 03 (Desa Babakan - Kecamatan babakan)	-	-	-		
7.01.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terbayarnya jasa penyedia peralatan dan perlengkapan kantor	6 Jenis	6 Jenis	Jalan Raya Babakan Nomor : 03 (Desa Babakan - Kecamatan babakan)	2.190.000	2.190.000	-	PIS	PIS
		Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan yang kantor yang disediakan	6 Jenis		Jalan Raya Babakan Nomor : 03 (Desa Babakan - Kecamatan babakan)	-	-	-		
7.01.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 BA	1 BA	1 BA	277.718.100	277.718.100	-		
		Jumlah barang milik daerah yang dipelihara	5 Jenis			-	-	-		
7.01.01.01.2.09	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara	10 Unit	10 Unit	Jalan Raya Babakan Nomor : 03 (Desa Babakan - Kecamatan babakan)	36.180.000	36.180.000	-	PIS	PIS
		Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara	10 Unit		Jalan Raya Babakan Nomor : 03 (Desa Babakan - Kecamatan babakan)	-	-	-		
7.01.01.01.2.09	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas	Terbayarnya jasa penyedia perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	9 Unit	9 Unit	Jalan Raya Babakan Nomor : 03 (Desa Babakan - Kecamatan babakan)	2.459.500	2.459.500	-	PIS	PIS
		Jumlah kendaraan Dinas Operasional yang dibayarkan pajak dan jasa pemeliharannya	10 Unit	10 Unit	Jalan Raya Babakan Nomor : 03 (Desa Babakan - Kecamatan babakan)	-	-	-		

7.01.01.01.2.0 9 .09.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jalan Raya Babakan Nomor : 03 (Desa Babakan - Kecamatan babakan)	1 Paket	0 Paket	38.268.800	32.268.800		P I S
		Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jalan Raya Babakan Nomor : 03 (Desa Babakan - Kecamatan babakan)	1 Unit	1 Unit	-	-		
7.01.01.01.2.0 9 .10.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan	Jalan Raya Babakan Nomor : 03 (Desa Babakan - Kecamatan babakan)	1 Paket	0,65 Paket	200.809.800	200.809.800	PIS	P I S
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang dipelihara	Jalan Raya Babakan Nomor : 03 (Desa Babakan - Kecamatan babakan)	1 Unit	1 Unit	-	-		
7.01.02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Meningkatnya Pelayanan Publik		100 Prosen	100 Prosen	111.246.600	111.246.600		
		Cakupan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintah Kepada Camat		100 Prosen	60 Prosen	-	-		
		Prosentase Peningkatan Pelimpahan Efektifitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan		100 Prosen	100 Prosen	-	-		
7.01.02.2.01.	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		1 BA	1 BA	52.416.800	52.416.800		
	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Perangkat Daerah Instansi Vertikal Terkait	Terlaksananya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan	Jalan Raya Babakan Nomor : 11 (Desa Babakan - Kecamatan babakan)	1 Unit	1 Unit	22.500.000	22.500.000	-	-
7.01.02.2.01.0 2.	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terbayarnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jalan Raya Babakan Nomor : 03 (Desa Babakan - Kecamatan babakan)	10 Unit	9 Unit	29.916.800	29.916.800	PIS	P I S
	Jumlah kendaraan Dinas Operasional yang dibayarkan pajak dan jasa pemeliharannya	Jalan Raya Babakan Nomor : 03 (Desa Babakan - Kecamatan babakan)		10 Unit	10 Unit	-	-		

7.01.01.01.2.0 9 .02.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas	Terbayarnya jasa penyedia perijinan Kendaraan Dinas/Oprasional	Jalan Raya Babakan Nomor : 03 (Desa Babakan - Kecamatan babakan)	10 Unit	9 Unit	-	-	-	-	-	-	-	-
7.01.01.01.2.0 9 .09.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah kendaraan Dinas Operasional yang dibayarkan pajak dan jasa Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung	Jalan Raya Babakan Nomor : 03 (Desa Babakan - Kecamatan)	1 Paket	0 Paket	-	-	-	-	-	-	-	P I S
7.01.01.01.2.0 9 .10.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan	Jalan Raya Babakan Nomor : 03 (Desa Babakan - Kecamatan)	1 Paket	0,65 Paket	-	-	-	-	-	-	-	P I S
7.01.02.2.02.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Penyelenggaraan Urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jalan Raya Babakan Nomor : 03 (Desa Babakan - Kecamatan babakan)	1 BA	1 BA	5.583.800	5.583.800	5.583.800	5.583.800	-	-	-	-
7.01.02.2.02.03.	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat diWilayah Kecamatan	Terpeliharanya Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat diWilayah Kecamatan	Jalan Raya Babakan Nomor : 03 (Desa Babakan - Kecamatan babakan)	10 Unit	9 Unit	5.583.800	5.583.800	5.583.800	5.583.800	-	-	-	-
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat diWilayah Kecamatan	Jalan Raya Babakan Nomor : 03 (Desa Babakan - Kecamatan babakan)	1 BA	1 BA	53.246.000	53.246.000	53.246.000	53.246.000	-	-	-	-
7.01.01.2.04.03.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jalan Raya Babakan Nomor : 03 (Desa Babakan - Kecamatan babakan)	10 Unit	9 Unit	53.246.000	53.246.000	53.246.000	53.246.000	-	-	-	P I S
		Jumlah Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jalan Raya Babakan Nomor : 03 (Desa Babakan - Kecamatan babakan)										-

7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Jalan Raya Babakan Nomor : 03 (Desa Babakan - Kecamatan babakan)	100 Prosen	100 Prosen	32.707.600	32.707.600	-	-
			Jalan Raya Babakan Nomor : 03 (Desa Babakan - Kecamatan babakan)	100 Prosen		-	-	-	-
7.02.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Terpeliharanya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jalan Raya Babakan Nomor : 03 (Desa Babakan - Kecamatan babakan)	1 BA	1 BA	32.707.600	32.707.600	-	-
7.01.03.0.01.03.	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terpeliharanya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jalan Raya Babakan Nomor : 03 (Desa Babakan - Kecamatan babakan)			32.707.600	32.707.600	-	-
		Jumlah Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jalan Raya Babakan Nomor : 03 (Desa Babakan - Kecamatan babakan)			-	-	-	-
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatnya Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jalan Raya Babakan Nomor : 03 (Desa Babakan - Kecamatan babakan)	100 Prosen	100 Prosen	47.711.800	47.711.800	-	-
			Jalan Raya Babakan Nomor : 03 (Desa Babakan - Kecamatan babakan)	100 Prosen	100 Prosen	47.711.800	47.711.800	-	-
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Terpeliharanya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jalan Raya Babakan Nomor : 03 (Desa Babakan - Kecamatan babakan)			-	-	-	-
7.01.04.2.02.01	Sinegritas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi vertical di wilayah kecamatan	Terpeliharanya Sinegritas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi vertical di wilayah kecamatan	Jalan Raya Babakan Nomor : 03 (Desa Babakan - Kecamatan babakan)			-	-	-	-
7.01.04.2.02.	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Terpeliharanya Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jalan Raya Babakan Nomor : 03 (Desa Babakan - Kecamatan babakan)			47.711.800	47.711.800	-	-

7.01.06.2.01.06	Fasilitas Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Terpeliharanya Fasilitas Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jalan Raya Babakan Nomor : 03 (Desa Babakan - Kecamatan babakan)	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah Fasilitas Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jalan Raya Babakan Nomor : 03 (Desa Babakan - Kecamatan babakan)	-	-	-	-	-	-	-
J U M L A H										
				2.803.568.418	2.847.588.418	(44.020.000)				

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Perencanaan dan Penganggaran merupakan suatu kesatuan dan proses yang tidak terpisahkan dari Rencana Pembangunan. Mekanisme perencanaan pembangunan dimulai dari penjangkauan aspirasi masyarakat dan pengkajian kebutuhan masyarakat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan di tingkat Desa yang dilanjutkan dengan musyawarah Perencanaan di tingkat Kecamatan. Proses perencanaan di Kecamatan Babakan ada 4 (empat) tahapan perencanaan pembangunan, yaitu :

1. Penyusunan Rencana
2. Penetapan Rencana
3. Pengendalian Pelaksanaan Rencana
4. Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Usulan program dan kegiatan masyarakat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tersebut dapat dilihat pada tabel Daftar Skala Prioritas Pembangunan Kecamatan Babakan Tahun 2024 sebagaimana data terlampir.

Tabel 2.4

**Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2024 Kabupaten Cirebon**

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Babakan

No.	Deskripsi Pekerjaan / Jenis Belanja / Program / Kegiatan	Lokasi / Kecamatan / Desa	Volume	Pagu Anggaran	SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan, kesehatan dan ekonomi	Kecamatan Babakan	27 titik PJU Mandiri	405,000,000	DINAS PERHUBUNGAN
2	Meningkatnya kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan, kesehatan dan ekonomi	Kecamatan Babakan	P: 556 m L: 3 m	596,000,000	DPUTR
3	Meningkatnya kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan, kesehatan dan ekonomi	Kecamatan Babakan	1 kegiatan	500,000,000	DPUTR

4	Meningkatnya kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan, kesehatan dan ekonomi	Kecamatan Babakan	1 kegiatan	20,000,000	KECAMATAN BABAKAN
5	Meningkatnya kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan, kesehatan dan ekonomi	Kecamatan Babakan	1 kegiatan	50,000,000	KECAMATAN BABAKAN
6	Meningkatnya kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan, kesehatan dan ekonomi	Kecamatan Babakan	1 kegiatan	30,000,000	KECAMATAN BABAKAN
7	Perluasan Jaminan Kesehatan Dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Baik Bersifat Preventif Maupun Kuratif Berbasis Masyarakat	Kecamatan Babakan	1 kegiatan	25,000,000	DINAS PEMUDA dan OLAHRAGA
8	Peningkatan Akses, Kualitas Pendidikan Dan Partisipasi Masyarakat Untuk Keberlanjutan Pendidikan Dasar	Kecamatan Babakan	1 kegiatan	36,000,000	DINAS PENDIDIKAN
JUMLAH DANA PIK				1.662.000.000	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN BABAKAN

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Kebijakan-kebijakan Nasional ditetapkan dalam kerangka pembangunannya, secara operasional pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan kepada Camat dalam kegiatan penyelenggaraan pelimpahan urusan pemerintahan bidang ekonomi, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, bidang kesejahteraan sosial, bidang keamanan ketertiban perlindungan masyarakat dan pembinaan kesatuan bangsa, bidang pelayanan umum, bidang pemerintahan umum dan pemerintahan desa.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA KECAMATAN BABAKAN

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja SKPD selama lima tahun.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Rumusan tujuan merefleksikan konteks pembangunan yang dihadapi SKPD dan memiliki keterkaitan dengan visi SKPD yang ingin dicapai. Pernyataan tujuan tersebut akan diterjemahkan kedalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai. Dalam menentukan tujuan tidaklah mutlak harus terukur, kuantitatif, ataupun tangible, namun setidaknya dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai apa yang akan dicapai dimasa mendatang.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi SKPD atau kelompok sasaran yang dilayani, serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja. Kriteria dalam perumusan sasaran yakni :

- a. *Specific* (spesifik), yakni sifat dan tingkat sasaran dapat diidentifikasi dengan jelas;
- b. *Measurable* (dapat diukur), yakni target sasaran dinyatakan dengan jelas dan terukur;
- c. *Achievable* (dapat dicapai), yakni target sasaran dapat dicapai terkait dengan kapasitas dan sumber daya yang ada;
- d. *Relevant* (relevan), yakni mencerminkan keterkaitan antara target sasaran dengan tujuan;
- e. *Time Bound* (batas waktu), yakni periode pencapaian sasaran ditetapkan; dan
- f. *Continuously improve* (perbaikan berkelanjutan), yakni sasaran dapat dicapai secara bertahap.

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

A. Faktor-faktor yang membandingkan bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan

Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas program, agar mampu eksis dan unggul dalam persaingan yang semakin ketat dalam lingkungan yang berubah sangat cepat, maka suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil. Program Kerja dan Kegiatan Kecamatan Babakan Mengacu kepada Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Cirebon, Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Pendayagunaan Potensi Ekonomi Daerah. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan dapat dilihat pada tabel 4 terlampir.

Urusan Kewenangan Kantor Camat Babakan pada Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menjadi urusan wajib adalah :

1. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
2. Kepemudaan dan Olahraga
3. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
4. Pemberdayaan Masyarakat Desa
5. Kependudukan

B. Uraian Garis Besar mengenai Rekapitulasi Program dan Kegiatan, antara lain meliputi:

Program-program dan kegiatan-kegiatan yang ada di kecamatan terangkum dalam urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian yang diamanatkan dalam RPJMD Kabupaten Cirebon dengan 3 (Tiga) indikator kinerja Kantor Kecamatan Babakan dalam rangka pencapaian visi dan misi pembangunan jangka menengah sampai dengan tahun 2024, yang direalisasikan dalam program pembangunan daerah yaitu :

I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPTEN/ KOTA

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Koordinasi Dan Penyusunan DPA-SKPD

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerj SKPD

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD

3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

4. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

Penyediaan Bahan/Material

Fasilitasi Kunjungan Tamu

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Pengadaan Mebel

Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

II PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK KECAMATAN

1 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait

Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

2 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan

Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan

3 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Nonperizinan

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan

III PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

IV PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan

2. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada

Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

V PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketertiban Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemerintahan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pembinaan Kerukunan Antar suku dan Intra suku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional

Pelaksanaan Tugas forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

VI. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

1. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa

C. Tabel Rencana Program dan Kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan Tabel 3.1 yaitu sebagai berikut :

Tabel 3.1

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Babakan Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 Kabupaten Cirebon



DRAFT RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA (RENJA) SKPD TAHUN 2024 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025 PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

SKPD: 7-1.0-0.0-05. KECAMATAN BABAKAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2024				Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Asal Ajuan	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0.	NON URUSAN				10.811.132.576				10.811.132.576
0.00.	NON BIDANG URUSAN				10.811.132.576				10.811.132.576
0.00.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Persentase kepatuhan dalam pelaksanaan SOP pelayanan pemerintah		100 Prosen	10.811.132.576			100 Prosen	10.811.132.576
0.00.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja perangkat daerah yang dihasilkan		6 Jenis	53.000.000	PIS		6 Jenis	61.000.000
0.00.01.2.01.01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat, Daerah	Jln Pangeran Sutajaya No.11 Babakan	2 Dok	8.000.000	PIS		2 Dok	8.000.000
0.00.01.2.01.02.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	- (- Kecamatan babakan)	1 Dok	16.000.000	PIS		1 Dok	16.000.000
0.00.01.2.01.03.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	- (- Kecamatan babakan)	1 Dok	11.000.000	PIS		1 Dok	11.000.000
0.00.01.2.01.04.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	- (- Kecamatan babakan)	1 Dok	6.000.000	PIS		1 Dok	6.000.000
0.00.01.2.01.05.	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	- (- Kecamatan babakan)	1 Dok	10.000.000	PIS		1 Dok	10.000.000
0.00.01.2.01.07.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat, Daerah	- (- Kecamatan babakan)	1 Laporan	2.000.000	PIS		1 Laporan	2.000.000
0.00.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan pengadministrasian keuangan		3 Jenis	1.387.500.000	PIS		3 Jenis	1.387.500.000
0.00.01.2.02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan, Tunjangan ASN	Kabupaten Cirebon	15 Orang/Bulan	1.374.500.000	PIS		15 Orang/Bulan	1.374.500.000
0.00.01.2.02.05.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jln Pangeran Sutajaya No.11 Babakan	1 Laporan	7.000.000	PIS		1 Laporan	7.000.000

Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2024					Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025			
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
0.00.01.2.02.07.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jln Pangeran Sutajaya No.11 Babakan	18 Laporan	6.000.000	PIS		18 Laporan	6.000.000		
0.00.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pegawai yang teradministrasi dengan baik		25 Orang	25.000.000	PIS		25 Orang	25.000.000		
0.00.01.2.05.02.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut, Kelengkapan	Jln Pangeran Sutajaya No.11 Babakan	26 Paket	25.000.000	PIS		26 Paket	25.000.000		
0.00.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah komponen penunjang kinerja pelayanan		8 Jenis	143.932.000	PIS		8 Jenis	143.932.000		
0.00.01.2.06.01.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi, Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jln Pangeran Sutajaya No.11 Babakan	10 Paket	50.000.000	PIS		10 Paket	50.000.000		
0.00.01.2.06.02.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan, Kantor yang Disediakan	Jln Pangeran Sutajaya No.11 Babakan	11 Paket	10.000.000	PIS		11 Paket	10.000.000		
0.00.01.2.06.04.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Cirebon	11 Paket	13.000.000	PIS		11 Paket	13.000.000		
0.00.01.2.06.05.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan, yang Disediakan	Jln Pangeran Sutajaya No.11 Babakan	8 Paket	13.000.000	PIS		8 Paket	13.000.000		
0.00.01.2.06.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Jln Pangeran Sutajaya No.11 Babakan	2 Dokumen	5.000.000	PIS		2 Dokumen	5.000.000		
0.00.01.2.06.07.	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Jln Pangeran Sutajaya No.11 Babakan	1 Paket	20.000.000	PIS		1 Paket	20.000.000		
0.00.01.2.06.08.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu (makanan dan minuman tamu)	Jln Pangeran Sutajaya No.11 Babakan	11 Laporan	17.992.000	PIS		11 Laporan	17.992.000		
0.00.01.2.06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jln Pangeran Sutajaya No.11 Babakan	50 Laporan	14.940.000	PIS		50 Laporan	14.940.000		
0.00.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		1 BA	8.310.000.000	PIS		1 BA	8.310.000.000		
		Jumlah barang milik daerah yang diadakan		4 jenis	-	PIS		4 jenis	-		
0.00.01.2.07.01.	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau, Lapangan yang Disediakan	- (- Kecamatan babakan)	9 Unit	4.000.000.000	PIS		9 Unit	4.000.000.000		

Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2024					Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Asal Ajuan	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0.00.01.2.07.02.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau, Lapangan yang Disediakan	Jln Pangeran Sutajaya No. 11 Babakan	4 Unit	250.000.000	PIS		4 Unit	250.000.000
0.00.01.2.07.05.	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jln Pangeran Sutajaya No. 11 Babakan (- Kecamatan babakan)	4 Unit	4.000.000.000	PIS		4 Unit	4.000.000.000
0.00.01.2.07.10.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jln Pangeran Sutajaya No. 11 Babakan (- Kecamatan babakan)	1 Unit	60.000.000	PIS		1 Unit	60.000.000
0.00.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Penunjang urusan pemerintah daerah yang dibayarkan/dilaksanakan		2 Jenis	85.000.000	PIS		2 Jenis	85.000.000
0.00.01.2.08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jln Pangeran Sutajaya No. 11 Babakan	2 Laporan	60.000.000	PIS		2 Laporan	60.000.000
0.00.01.2.08.03.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan, Perlengkapan Kantor yang Disediakan		20 Laporan	25.000.000	PIS		20 Laporan	25.000.000
0.00.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara		5 Jenis	806.700.576	PIS		5 Jenis	806.700.576
0.00.01.2.09.01.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		10 Unit	43.243.200	PIS		10 Unit	43.243.200
0.00.01.2.09.02.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jln Pangeran Sutajaya No. 11 Babakan	10 Unit	2.860.000	PIS		10 Unit	2.860.000
0.00.01.2.09.09.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jln Pangeran Sutajaya No. 11 Babakan	3 Unit	260.597.376	PIS		3 Unit	260.597.376
0.00.01.2.09.10.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang, Dipelihara/Direhabilitasi		1 Unit	500.000.000	PIS		1 Unit	500.000.000
7.	UNSUR KEWILAYAHAN				1.981.599.300				1.981.599.300
7.01.	KECAMATAN				1.981.599.300				1.981.599.300
7.01.02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Peningkatan Pelimpahan Efektifitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik		100 Persen	589.947.000			100 Persen	589.947.000

Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2024					Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025			
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
7.01.02.2.01.	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah koordinasi penyelenggaraan pemerintah di tingkat kecamatan	(4)	2 Jenis	194.852.000	PIS	(8)	2 Jenis	194.852.000		
7.01.02.2.01.01.	Koordinasi/Sinergi/Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jln Pangeran Sutajaya No.11 Babakan (- Kecamatan babakan)	3 Laporan	100.000.000	PIS		3 Laporan	100.000.000		
7.01.02.2.01.02.	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jln Pangeran Sutajaya No.11 Babakan	12 Dok	94.852.000	PIS		12 Dok	94.852.000		
7.01.02.2.02.	Penyelenggaraan Usuran Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah usuran pemerintahan yang dilaksanakan kecamatan yang tidak dilaksanakan oleh perangkat daerah.		3 Jenis	165.139.200	PIS		3 Jenis	165.139.200		
7.01.02.2.02.02.	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jln Pangeran Sutajaya No.11 Babakan (- Kecamatan babakan)	4 Laporan	80.000.000	PIS		4 Laporan	80.000.000		
7.01.02.2.02.03.	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jln Pangeran Sutajaya No.11 Babakan	12 Dok	85.139.200	PIS		12 Dok	85.139.200		
7.01.02.2.04.	Pelaksanaan Usuran Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah jenis usuran pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat		3 Jenis	229.955.800	PIS		3 Jenis	229.955.800		
7.01.02.2.04.01.	Pelaksanaan Usuran Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	- (- Kecamatan babakan)	12 Dok	90.000.000	PIS		12 Dok	90.000.000		
7.01.02.2.04.02.	Pelaksanaan Usuran Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan, pada Urusan Pemerintahan		12 Laporan	20.000.000	PIS		12 Laporan	20.000.000		
7.01.02.2.04.03.	Pelaksanaan Usuran Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jln Pangeran Sutajaya No.11 Babakan	12 Laporan	119.955.800	PIS		12 Laporan	119.955.800		
7.01.03.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dilaksanakan		100 Persen	189.713.100			100 Persen	105.993.100		
7.01.03.2.01.	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah jenis Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		3 Jenis	189.713.100	PIS		3 Jenis	105.993.100		

Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2024					Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Asal Ajuan	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
7.01.03.2.01.02.	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Yang Dilakukan Oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan		2 Dok	25.000.000	PIS		2 Dok	25.000.000
7.01.03.2.01.03.	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas, Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jln Pangeran Sutajaya No. 11 Babakan	12 Laporan	164.713.100	PIK, PIS		12 Laporan	80.993.100
7.01.04.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Kegiatan Koordinasi untuk meningkatkan Ketentraman dan Ketertiban Umum		100 Persen	143.939.200			100 Persen	143.939.200
7.01.04.2.01.	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah rapat koordinasi dalam penyelenggaraan trantribum		12 Laporan	50.000.000	PIS		12 Laporan	50.000.000
7.01.04.2.01.01.	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di, Wilayah Kecamatan	-	4 Laporan	50.000.000	PIS		4 Laporan	50.000.000
7.01.04.2.02.	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		12 Laporan	93.939.200	PIS		12 Laporan	93.939.200
7.01.04.2.02.01.	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik, Indonesia	Jln Pangeran Sutajaya No. 11 Babakan	12 Laporan	93.939.200	PIS		12 Laporan	93.939.200
7.01.05.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase urusan pemerintahan umum yang di tugaskan kepala pemerintah daerah kepada camat		100 Persen	410.000.000			100 Persen	410.000.000
7.01.05.2.01.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Jenis Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		8 Jenis	410.000.000	PIS		8 Jenis	410.000.000
7.01.05.2.01.02.	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan, Ketahanan Nasional		4 Orang	270.000.000	PIS		4 Orang	270.000.000
7.01.05.2.01.03.	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan, Persatuan dan Kesatuan Bangsa		4 Orang	70.000.000	PIS		4 Orang	70.000.000

Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2024					Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Asal Ajuan	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
7.01.05.2.01.08.	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan, Persatuan dan Kesatuan Bangsa		12 Dok	70.000.000	PIS		12 Dok	70.000.000
7.01.06.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Peningkatan Persentase kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan desa		100 Persen	648.000.000			100 Persen	648.000.000
7.01.06.2.01.	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah jenis Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang dilaksanakan		14 Jenis	648.000.000	PIS		14 Jenis	648.000.000
7.01.06.2.01.01.	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan, Kepala Desa	- (- Kecamatan babakan)	12 Dok	50.000.000	PIS		12 Dok	50.000.000
7.01.06.2.01.02.	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	- (- Kecamatan babakan)	4 Dok	25.000.000	PIS		4 Dok	25.000.000
7.01.06.2.01.03.	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan, Aset Desa		12 Dok	140.000.000	PIS		12 Dok	140.000.000
7.01.06.2.01.05.	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka, Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	- (- Kecamatan babakan)	12 Dok	25.000.000	PIS		12 Dok	25.000.000
7.01.06.2.01.06.	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka, Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa		12 Dok	200.000.000	PIS		12 Dok	200.000.000
7.01.06.2.01.07.	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka, Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	- (- Kecamatan babakan)	12 Dok	50.000.000	PIS		12 Dok	50.000.000
7.01.06.2.01.08.	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	- (- Kecamatan babakan)	12 Dok	5.000.000	PIS		12 Dok	5.000.000
7.01.06.2.01.09.	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan, Desa	- (- Kecamatan babakan)	12 Dok	10.000.000	PIS		12 Dok	10.000.000
7.01.06.2.01.10.	Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Fasilitasi Lokasi Pembangunan, Kawasan Perdesaan	- (- Kecamatan babakan)	12 Dok	50.000.000	PIS		12 Dok	50.000.000
7.01.06.2.01.14.	Fasilitasi Kerja Sama Antardesa dan Kerja Sama Desa Dengan Pihak Ketiga	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan, Pihak Ketiga	- (- Kecamatan babakan)	12 Dok	30.000.000	PIS		12 Dok	30.000.000
7.01.06.2.01.15.	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penegasan, Batas Desa	- (- Kecamatan babakan)	12 Dok	13.000.000	PIS		12 Dok	13.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2024				Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Asal Ajuan	Catatan Penting	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
7.01.06.2.01.16.	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka, Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa		12 Dok	50.000.000	PIS		12 Dok	50.000.000
J U M L A H									
					12.792.731.876				12.709.011.876

Rencana program dan kegiatan daerah yang dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) SKPD untuk diarahkan dalam pencapaian sasaran dan target pembangunan yang belum dapat dicapai.

Rincian rencana program dan kegiatan Kecamatan Babakan tahun 2024 sebagai berikut :

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Jumlah Dana
1	2	3
0	NON URUSAN	
0.00.	NON BIDANG URUSAN	
0.00.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
0.00.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
0.00.01.2.01.01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8.000.000
0.00.01.2.01.02.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	16.000.000
0.00.01.2.01.03.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	11.000.000
0.00.01.2.01.04.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	6.000.000
0.00.01.2.01.05.	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	10.000.000
0.00.01.2.01.06.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7.000.000
0.00.01.2.01.07.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2.000.000
0.00.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
0.00.01.2.02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.374.500.000
0.00.01.2.02.05.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	7.000.000
0.00.01.2.02.07.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	6.000.000
0.00.01.2.05.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
0.00.01.2.05.02.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	25.000.000
0.00.01.2.05.10.	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	-
0.00.01.2.05.11.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	-
0.00.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
0.00.01.2.06.01.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	50.000.000
0.00.01.2.06.02.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10.000.000
0.00.01.2.06.03.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	-
0.00.01.2.06.04.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	13.000.000
0.00.01.2.06.05.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	13.000.000
0.00.01.2.06.06.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5.000.000
0.00.01.2.06.07.	Penyediaan Bahan/Material	20.000.000
0.00.01.2.06.08.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	17.992.000
0.00.01.2.06.09.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	14.940.000
0.00.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	

0.00.01.2.07.01.	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	4.000.000.000
0.00.01.2.07.02.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	250.000.000
0.00.01.2.07.05.	Pengadaan Mebel	4.000.000.000
0.00.01.2.07.10.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	60.000.000
0.00.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
0.00.01.2.08.02.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60.000.000
0.00.01.2.08.03.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	25.000.000
0.00.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
0.00.01.2.09.01.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	43.243.200
0.00.01.2.09.02.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2.860.000
0.00.01.2.09.09.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	260.597.376
0.00.01.2.09.10.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	500.000.000
7	UNSUR KEWILAYAHAN	
7.01.	KECAMATAN	
7.01.02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
7.01.02.2.01.	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	194.852.000
7.01.02.2.01.01.	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	100.000.000
7.01.02.2.01.02.	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	94.852.000
7.01.02.2.02.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	
7.01.02.2.02.02.	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	80.000.000
7.01.02.2.02.03.	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	85.139.200
7.01.02.2.04.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	
7.01.02.2.04.01.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	90.000.000
7.01.02.2.04.02.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	20.000.000
7.01.02.2.04.03.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	119.955.800
7.01.03.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
7.01.03.2.01.	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	189.713.100
7.01.03.2.01.02.	Sinkronasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan Oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	25.000.000
7.01.03.2.01.03.	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	164.713.100
7.01.04.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
7.01.04.2.01.	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	50.000.000
7.01.04.2.01.01.	Sinegtritas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara	50.000.000

	Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	
7.01.04.2.02.	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	93.939.200
7.01.04.2.02.01.	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	93.939.200
7.01.05.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	
7.01.05.2.01.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	410.000.000
7.01.05.2.01.02.	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	270.000.000
7.01.05.2.01.03.	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	70.000.000
7.01.05.2.01.08.	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	70.000.000
7.01.06.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
7.01.06.2.01.	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
7.01.06.2.01.01.	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	50.000.000
7.01.06.2.01.02.	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintah Desa	25.000.000
7.01.06.2.01.03.	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	140.000.000
7.01.06.2.01.05.	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	25.000.000
7.01.06.2.01.06.	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	200.000.000
7.01.06.2.01.07.	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	50.000.000
7.01.06.2.01.08.	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	5.000.000
7.01.06.2.01.09.	Fasilitasi Sinkronasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	10.000.000
7.01.06.2.01.10.	Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	50.000.000
7.01.06.2.01.14.	Fasilitasi Kerjasama Antar Desa dan Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga	30.000.000
7.01.06.2.01.15.	Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa Serta Penetapan dan Pengesahan Batas Desa	13.000.000
7.01.06.2.01.16.	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	50.000.000
J U M L A H		12.792.731.876

BAB VI PENUTUP

Rencana kerja merupakan tolak ukur penting dari suatu sistem akuntabilitas kinerja. Perencanaan kerja merupakan acuan tugas pokok dan fungsi pada Kecamatan Babakan di masa yang akan datang secara terencana dan terkoordinasi. Dengan demikian akan tercipta keinginan untuk meningkatkan kinerja dan fokus perbaikan di masa yang akan datang. Pelaksanaan pembangunan di bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kehidupan Masyarakat dalam wilayah kecamatan, memerlukan perhatian khusus dari semua pihak yang terkait dengan persepsi yang sama, agar dapat terlaksana sesuai dengan yang diharapkan. Masyarakat juga dilibatkan dalam pengawasan dan pemeliharaan setiap kegiatan pembangunan agar dapat berdaya guna sesuai yang direncanakan. Kecamatan Babakan sebagai salah satu kecamatan di Kabupaten Cirebon, akan berupaya seoptimal mungkin untuk mendukung terwujudnya visi dan misi Pemerintah Kabupaten Cirebon.

Untuk mendukung hal tersebut, Kecamatan Babakan Kabupaten Cirebon menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program dan kegiatan tahun 2024. Rencana Kerja Kecamatan Babakan yang telah disusun ini merupakan komitmen dari pimpinan dan seluruh staf Kecamatan Babakan demi terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Dengan disusunnya Rencana Kerja ini, Kecamatan Babakan telah mempersiapkan diri untuk melaksanakan kegiatan dengan terencana dan terkoordinasi, dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai pada Tahun 2024, dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.



Diundangkan di Sumber
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

HILMY RIVA'I

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2023 NOMOR



RENCANA KERJA (RENJA)

KECAMATAN BABAKAN

TAHUN 2024

KABUPATEN CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas berkat dan rahmat-Nya kegiatan penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Babakan Kabupaten Cirebon Tahun 2024 dapat diselesaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Rencana Kerja Kecamatan Babakan Kabupaten Cirebon tahun 2024 merupakan penjabaran Visi Bupati Cirebon yang disesuaikan dengan tujuan Propinsi Jawa Barat dan Nasional namun tetap bernuansa kedaerahan. Dalam hal ini Kecamatan Babakan Kabupaten Cirebon sebagai lembaga yang bertugas membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa untuk berusaha menjabarkan Visi Bupati Cirebon dengan mencakup berbagai aspek pembangunan.

Secara umum materi Rencana Kerja Kecamatan Babakan berisi tentang visi, misi, tujuan, sasaran dan cara pencapaiannya. Adapun aspek pembangunan yang dijabarkan dalam tugas pokok dan fungsi Kecamatan Babakan sebagai mitra dan Pemandu Masyarakat yang tangguh dalam pemberdayaan masyarakat guna terbangunnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang beriman dan produktif menuju masyarakat yang sejahtera.

Akhirnya semoga Rencana Kerja Perubahan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dalam pelaksanaan berbagai program dan kegiatan tahun 2024 guna pencapaian dan sasaran dalam pembangunan yang dijabarkan dalam bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa.

Terima kasih yang tak terhingga kepada Sekertaris, semua Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian serta seluruh pegawai yang telah bersama-sama merumuskan rancangan Rencana Kerja Perubahan dan berharap seluruh masyarakat juga dapat membantu dalam implementasinya.

Babakan, Februari 2023

CAMAT BABAKAN



Drs. ASEP NURDIN

Pembina Tk. I

NIP. 19720117 199202 1 003

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
RENJA KECAMATAN BABAKAN TAHUN 2024	
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	3
1.4 Sistematika Penulisan	4
BAB II HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN BABAKAN TAHUN 2022	5
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Babakan Tahun 2022 dan Capaian Renstra Kecamatan Babakan	5
2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Kecamatan Babakan	20
2.3 Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi	25
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	26
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	36
BAB III TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN BABAKAN	39
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	39
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Babakan	39
3.3 Program dan Kegiatan	40
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN BABAKAN	52
BAB V PENUTUP	55